



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

BADAN KESATUAN DAN POLITIK

Jln. Yos Sudarso Gedung Wenehule Huby Lt-5 Wamena-Jayawijaya 99511

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN DAN POLITIK KABUPATEN JAYAWIJAYA

Nomor : 25/2021

Tentang

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN DAN POLITIK KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPALA BADAN KESATUAN DAN POLITIK

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya;
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 5234) ;
2. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884) ;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana beberapa kali telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80) ;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Peranagkat Daerah Kabupaten Jayawijaya ;
 9. Peraturan Daerah Nomor 00 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 ;
 10. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
 11. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya ;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama diLingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan ukjuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan

dokumen rencana strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 ;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya ;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jayawijaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di: Wamena

Pada Tanggal : Januari 2021

KEPALA BADAN,



TENUS GOMBO, S.Pd. M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19720804 20011 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala BKBP Kab.Jayawijaya
Nomor : 25/2021
Tanggal : Januari 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA BKBP KABUPATEN JAYAWIJAYA

- 1. Instansi : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jayawijaya
- 2. Tugas : Melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya
- 3. Fungsi :
 - 1. Perumusan kebijakan di Politik dalam negeri
 - 2. Pelaksanaan di bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional
 - 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di politik dan konflik dan kewaspadaan nasional
 - 4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
 - 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE -				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkannya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja	Presentasi Anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK	0 %	0%	0%		
	Predikat Evaluasi SAKIP	B	B	B		
Meningkatkan kualitas	Indeks demokrasi	100%	100%	100%		

penyelenggaraan pendidikan politik dengan tingkat partisipasi politik yang tinggi dalam iklim yang demokratis dan kondusif						
	Presentasi tingkat pemahaman masyarakat	85%	85%	85%		
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan persatuan dan kesatuan masyarakat yang kokoh melalui budaya multicultural dengan mengembangkan aspek kebangsaan dan kebhinekaan	Presentasi kasus konflik sosial tertangani	75%	75%	75%		

Ditetapkan di : Wamena
Pada Tanggal : Januari 2021

KEPALA BADAN,



TENUS GOMBO, S.Pd. M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19720804 20011 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA BKBP TAHUN 2018-2023

No	IKU/ Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi wawasan kebangsaan, bela negara dan cinta tanah air	Prosentase peserta yang memahami ideologi wasbang, bela Negara dan cinta tanah air	78,55	80.00	81.50	83.00	85.00
2.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kewaspadaan nasional di daerah	Prosentase penurunan konflik SARA	72.00	72.85	73.00	73.50	74.00
3.	Meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarakat	Prosentase penurunan jumlah tindak kriminalitas di daerah	50.39	60.79	70.50	70.79	80.00
4.	Meningkatnya pemahaman ketahanan masyarakat akan pentingnya ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi	Prosentase jumlah ORMAS/LSM yang memiliki SKT	80.00	87.14	90.00	90.50	91.00